



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DRS. OJAT DAROJAT, M.BUS
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 514272

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.190.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. Tanah Seluas 2.954 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 46 m2/46 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.443.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA TOYOTA ALL NEW RUSH-S M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 4X4 8 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5G A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 405.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.441.964.516

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 7.480.564.516

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.480.564.516

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.